LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)



Program Studi Sistem Informasi
Tahun Akademik 2025/2026

SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
PONTIANAK
Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

Nomor : 016/U/STMIK-PTK/VIII/2026 Pontianak, 01 Agustus 2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Tinjauan Manajemen
Periode T.A 2025/2026

Kepada : Yth. 1. Tim AMI STMIK Pontianak
2. Ketua STMIK Pontianak
3. Kepala Unit Kerja STMIK Pontianak

Dalam rangka melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta memastikan keberlanjutan peningkatan mutu Program Studi Sistem Informasi, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Program Studi Sistem Informasi. Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian standar, indikator kinerja, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta berbagai aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Sistem Informasi. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa / 18 Agustus 2026**
Pukul : **09.00 wib sampai selesai**
Tempat : **Ruang Rapat**
Agenda : ***terlampir***
Sifat : **Wajib dihadiri**

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Unit Penjaminan Mutu Internal
Kepala,

Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom, M.Kom
NIPY. 1403082

SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
PONTIANAK
Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

Lampiran: Nomor:016/U/STMIK-PTK/VIII/2026

AGENDA RAPAT

1. Pembukaan dan pengarahan.
2. Evaluasi tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya.
3. Penyampaian hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator kinerja Program Studi.
4. Pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan, masukan pemangku kepentingan, serta temuan dan ketidaksesuaian.
6. Identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian standar mutu.
7. Penetapan tindakan pengendalian dan rencana peningkatan mutu.
8. Penetapan rekomendasi, tindak lanjut, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.
9. Penutup

	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
	Tanggal: 18 Agustus 2026	Waktu: 08.00 – Selesai	STMIK-PTK/SPMI/F.49/2022	Pimpinan Rapat: Dr. Sandy Kosasi, M.M., M.Kom

No.	Standar	Pokok Bahasan	Keputusan Tindak Lanjut	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	**Standar Suasana Akademik**	Perubahan kebutuhan layanan atau kebijakan akademik yang mengharuskan adanya menyesuaian dan pengembangan sistem informasi.	Peninjauan dan pengembangan sistem informasi secara berkala agar tetap selaras dengan kebutuhan pengguna dan ketentuan yang berlaku, disamping itu melakukan identifikasi kebutuhan perubahan sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan layanan sistem informasi akademik.	Wakil Ketua II dan PUSKOM.	2026/2027
		Ketergantungan pada koneksi internet pengguna yang dapat berbeda-beda kualitasnya.	Pengembangan dan perbaikan sistem untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, mempercepat waktu akses, serta memastikan kompatibilitas layanan pada berbagai perangkat dan jaringan internet yang digunakan oleh pengguna.	Wakil Ketua II dan PUSKOM.	2026/2027
		Gangguan server, akses lambat, error sistem, atau masalah jaringan internet dapat menurunkan kenyamanan mahasiswa dalam mengakses layanan akademik.	Peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur teknologi informasi, termasuk optimalisasi server, bandwidth jaringan, serta pemeliharaan sistem secara berkala.	Wakil Ketua II dan PUSKOM.	2026/2027
2.	**Standar Pengelolaan Keuangan**	Penyesuaian terhadap kebijakan internal maupun eksternal dapat memerlukan adaptasi sistem dan prosedur kerja sehingga mempengaruhi kelancaran pengelolaan informasi keuangan.	Melakukan penyesuaian sistem, prosedur kerja, dan mekanisme pengelolaan informasi keuangan secara terencana dan terkoordinasi, serta secara berkala melakukan kajian terhadap regulasi, kebijakan maupun ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan tata kelola keuangan.	Wakil Ketua II dan Bagian Keuangan	2026/2027
		Adanya mahasiswa yang kurang memahami prosedur dan ketentuan pembayaran, keterlambatan dalam pemenuhan dokumen administrasi, serta kendala teknis pada sistem informasi yang dapat memengaruhi ketepatan dan kelancaran proses administrasi keuangan.	Melakukan sosialisasi secara berkala melalui media resmi institusi, menyediakan panduan pembayaran, serta memberikan pengingat jadwal pembayaran kepada mahasiswa, serta melakukan koordinasi i secara berkala antara bagian keuangan, akademik, dan unit terkait.	Wakil Ketua II dan Bagian Keuangan	2026/2027
		Penyesuaian regulasi keuangan atau sistem pembayaran terkadang membutuhkan waktu adaptasi bagi pengguna maupun pengelola layanan.	Pemantauan dan pengkajian berkala terhadap kebijakan yang berlaku, sehingga dapat dilakukan penyesuaian prosedur dan sistem secara tepat waktu. Setiap perubahan regulasi disosialisasikan kepada pengguna dan pengelola	Wakil Ketua II dan Bagian Keuangan	2026/2027

			layanan melalui berbagai media komunikasi resmi agar informasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.		
3.	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	Perubahan kebutuhan dan kebijakan terkait rekrutmen dapat memerlukan peninjauan dan pembaruan SOP secara berkala.	koordinasi dan monitoring secara berkala antara pimpinan, bagian kepegawaian, dan unit terkait untuk memastikan SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan diterapkan secara konsisten.	Wakil Ketua II	2026/2027
		Keterbatasan waktu dan kesesuaian jadwal kegiatan pelatihan dengan jadwal pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dosen.	Melakukan perencanaan dan koordinasi jadwal kegiatan pengembangan kompetensi dosen secara berkala dengan mempertimbangkan beban tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dosen.	Wakil Ketua II	2026/2027
		Kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, terutama bagi tenaga kependidikan yang memiliki beban kerja operasional rutin.	Pemantauan dan evaluasi kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan secara berkala, khususnya terhadap tenaga kependidikan yang masih berkualifikasi D3. Institusi melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan pendidikan berdasarkan bidang tugas dan beban kerja.	Wakil Ketua II	2026/2027
4.	**Standar Sistem Informasi**	Adanya kebutuhan penyesuaian prosedur dan persyaratan layanan, khususnya untuk memastikan proses digitalisasi aktif kembali dan yudisium tetap sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.	Peninjauan dan penyesuaian prosedur serta persyaratan layanan secara berkala, khususnya pada layanan aktif kembali dan yudisium, agar proses digitalisasi tetap sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.	Wakil Ketua II dan PUSKOM	2026/2027
		Perlunya penyesuaian alur dan prosedur administrasi sebelum layanan surat menyurat dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi.	Pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi secara berkala untuk memastikan sistem informasi dapat digunakan secara optimal dalam mendukung layanan bagi dosen dan tenaga kependidikan.	Wakil Ketua II dan PUSKOM	2026/2027
5.	**Standar Tata Pamong**	Tidak semua unit memiliki tingkat pemahaman yang sama terkait implementasi PPEPP, sehingga kualitas pelaksanaan dapat berbeda-beda.	Menyamakan persepsi terhadap perbedaan tingkat pemahaman unit kerja dalam implementasi PPEPP dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan pelatihan, Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman PPEPP.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027
		Penyesuaian terhadap standar mutu atau kebijakan eksternal dapat memerlukan waktu adaptasi sehingga mempengaruhi kecepatan tindak lanjut.	Pemantauan regulasi secara berkala serta identifikasi dini terhadap perubahan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027
		Dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan standar akreditasi memerlukan pembaruan kompetensi secara terus-menerus.	Mengikuti perkembangan regulasi secara berkala serta peningkatan kompetensi SDM penjaminan mutu secara berkelanjutan. Institusi mendorong keikutsertaan SDM SPMI dalam pelatihan, workshop, seminar, sertifikasi, dan forum penjaminan mutu guna memastikan pemahaman terhadap perkembangan kebijakan, instrumen akreditasi, dan praktik terbaik penjaminan mutu selalu terbarui.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027

		Dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan standar akreditasi memerlukan pembaruan kompetensi secara cepat yang terkadang sulit diimbangi.	Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, webinar, workshop, forum diskusi, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang relevan dengan perkembangan regulasi dan instrumen akreditasi.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027
		Penyesuaian terhadap standar akreditasi, kebijakan pendidikan tinggi, atau format pelaporan baru dapat memerlukan waktu adaptasi.	Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar dan format pelaporan yang baru. Pengendalian juga mencakup pembaruan pedoman, instrumen, dan dokumen mutu, serta monitoring implementasi penyesuaian yang telah dilakukan.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027
		Penghambat pelaksanaan meliputi koordinasi dan komunikasi antarunit yang belum sepenuhnya optimal, perbedaan pemahaman terhadap tugas dan kewenangan, serta adanya dinamika perubahan pejabat struktural dan kebijakan institusi yang memerlukan proses adaptasi.	Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proses pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi untuk memastikan proses pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, melalui mekanisme Rapat Senat yang transparan, objektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap mekanisme, prosedur, dan dokumentasi proses pemilihan untuk memastikan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai periode jabatan yang telah ditetapkan.	Wakil Ketua II dan unit kerja	2026/2027
		Perbedaan mekanisme kerja atau keterlambatan validasi informasi antarunit dapat menyebabkan informasi tidak segera dipublikasikan.	Melakukan koordinasi, standardisasi prosedur pengelolaan dan publikasi informasi, serta penetapan alur komunikasi yang jelas antar unit terkait, selainjuga melakukan penyelarasan tugas dan tanggung jawab setiap unit untuk memastikan proses penyampaian, verifikasi, dan publikasi informasi dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.	Wakil Ketua II dan unit kerja	2026/2027
		Sebagian pengguna masih memerlukan penjelasan tambahan terkait prosedur, persyaratan, maupun alur layanan sehingga dapat memengaruhi persepsi terhadap kejelasan dan kemudahan layanan.	Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai prosedur, persyaratan, alur, dan standar layanan melalui sistem informasi serta media komunikasi resmi. Selain itu, disediakan panduan layanan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pengguna untuk mengurangi kesalahan pemahaman terhadap informasi dan prosedur yang berlaku.	Wakil Ketua II dan unit kerja	2026/2027
		Proses pengadaan, distribusi, maupun penggantian peralatan yang membutuhkan waktu dapat menyebabkan terdapat sarana tertentu yang belum tersedia atau belum dapat digunakan.	Pengendalian ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian, jumlah, kondisi, dan tingkat pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran, kemudian melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data sarana prasarana untuk memastikan kebutuhan yang belum terpenuhi maupun fasilitas yang mengalami kerusakan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.	Wakil Ketua II dan Bagian Umum dan perlengkapan	2026/2027
		Adanya perubahan kebijakan pemerintah, standar akreditasi, atau regulasi pendidikan	Melakukan pemantauan regulasi secara berkala serta peninjauan dokumen mutu secara sistematis, selain itu juga membentuk mekanisme kajian dan identifikasi terhadap	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027

		tinggi mengharuskan institusi melakukan revisi dokumen secara berkala.	setiap perubahan kebijakan untuk memastikan dokumen mutu, standar, prosedur, dan pedoman operasional selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku.		
		Adanya unit kerja memandang audit sebagai kegiatan administratif sehingga persiapan audit belum dilakukan secara optimal.	Melakukan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan fungsi Audit Mutu Internal (AMI) sebagai instrumen peningkatan mutu berkelanjutan. Institusi secara berkala memberikan pemahaman bahwa audit tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga bertujuan mengidentifikasi peluang perbaikan, memastikan ketercapaian standar mutu, serta mendukung peningkatan kinerja unit kerja.	Wakil Ketua II dan unit kerja	2026/2027
		Beberapa rekomendasi membutuhkan revisi kebijakan, pengadaan sarana, atau perubahan proses kerja sehingga memerlukan waktu implementasi yang lebih panjang.	Menyusunan rencana tindak lanjut yang terukur dengan menetapkan prioritas, target waktu, penanggung jawab, serta sumber daya yang dibutuhkan. Institusi melakukan pemetaan tingkat urgensi dan kompleksitas setiap rekomendasi untuk memastikan implementasi perbaikan dapat dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan institusi.	Wakil Ketua II dan UPMI	2026/2027
6.	**Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan**	Pemeliharaan dan pemeriksaan fasilitas praktikum secara berkala tetap diperlukan untuk mempertahankan kondisi fasilitas.	inventarisasi, pemeriksaan fungsi, dan pemeliharaan berkala untuk memastikan fasilitas tetap tersedia dan mendukung kelancaran pembelajaran praktik.	Ka. Prodi	2026/2027
		Pemeliharaan fasilitas ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala tetap diperlukan untuk mempertahankan kesesuaian ruang dan fungsinya.	Pemeriksaan kondisi dan pemeliharaan fasilitas secara berkala untuk mempertahankan fungsi ruangannya.	Ka. Prodi	2026/2027
		Pemeliharaan fasilitas ruang rapat secara berkala tetap diperlukan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi ruang.	Pemeliharaan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan ruang tetap mendukung kegiatan koordinasi dan akademik.	Ka. Prodi	2026/2027
		Pemeliharaan ruang dan fasilitas pendukung secara berkala tetap diperlukan untuk mempertahankan kondisi dan fungsinya.	pemeliharaan ruang dan fasilitas pendukung secara berkala untuk menjaga kelancaran proses pembelajaran.	Ka. Prodi	2026/2027
		Pemantauan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur TIK secara berkala tetap diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan fungsinya.	pemantauan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur TIK secara berkala.	Ka. Prodi	2026/2027
		Masih terdapat 29 responden (18,19%) yang menyatakan cukup puas atau kurang puas, sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara berkala.	pemantauan kepuasan dan tindak lanjut perbaikan sarana dan prasarana berdasarkan hasil survei.	Ka. Prodi	2026/2027

7.	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	Perubahan kebutuhan dan kebijakan terkait rekrutmen dapat memerlukan peninjauan dan pembaruan SOP secara berkala.	koordinasi dan monitoring secara berkala antara pimpinan, bagian kepegawaian, dan unit terkait untuk memastikan SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan diterapkan secara konsisten.	Wakil Ketua II	2026/2027
		Keterbatasan waktu dan kesesuaian jadwal kegiatan pelatihan dengan jadwal pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dosen.	Melakukan perencanaan dan koordinasi jadwal kegiatan pengembangan kompetensi dosen secara berkala dengan mempertimbangkan beban tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan dosen.	Wakil Ketua II	2026/2027
		Kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, terutama bagi tenaga kependidikan yang memiliki beban kerja operasional rutin.	Pemantauan dan evaluasi kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan secara berkala, khususnya terhadap tenaga kependidikan yang masih berkualifikasi D3. Institusi melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan pendidikan berdasarkan bidang tugas dan beban kerja.	Wakil Ketua II	2026/2027
		Masih terdapat 2 DTPR (12,5%) dengan EWMP di bawah 12 SKS, yaitu 9,5 SKS dan 9,0 SKS. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengaturan dan penyesuaian beban kerja pada periode berikutnya.	pemantauan dan penyesuaian EWMP secara berkala, khususnya terhadap DTPR dengan beban kerja di bawah 12 SKS.	Ka. Prodi	2026/2027
		Terdapat variasi distribusi beban pengajaran, dengan beban tertinggi 22 SKS dan terendah 3 SKS. Kondisi ini perlu diperhatikan dalam pembagian tugas pengajaran agar beban antar-DTPR tetap proporsional.	Pembagian dan pemantauan beban pengajaran secara berkala agar distribusi antar-DTPR tetap proporsional.	Ka. Prodi	2026/2027
		Masih terdapat 2 dari 16 DTPR (12,5%) yang belum memiliki beban SKS pada kegiatan Penelitian maupun PkM. Kondisi ini menjadi perhatian dalam peningkatan keterlibatan DTPR pada kegiatan Penelitian dan PkM.	Pemantauan dan peningkatan keterlibatan DTPR dalam kegiatan Penelitian dan PkM secara berkala.	Ka. Prodi	2026/2027
8.	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**	Perlunya penguatan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mempertahankan keberagaman sumber pendanaan.	Pemantauan dan penguatan perencanaan sumber penerimaan untuk menjaga konsistensi pencapaian target.	Ka. Prodi	2026/2027
		Keberlanjutan alokasi dana perlu dipertahankan agar dukungan pembiayaan operasional tetap terjaga.	penguatan dan pengembangan kemitraan eksternal untuk menjaga keberagaman sumber pendanaan.	Ka. Prodi	2026/2027
9.	**Standar Isi Pembelajaran**	Variasi distribusi tetap perlu dipantau dalam pengembangan kurikulum berikutnya.	Pemantauan distribusi dan pemetaan mata kuliah terhadap Profil Lulusan dalam pengembangan kurikulum secara berkala.	Ka. Prodi	2026/2027

		CPL08 memiliki alokasi 7 mata kuliah, di bawah rentang proporsional, sehingga perlu ditinjau dalam pengembangan kurikulum berikutnya.	Pemantauan pemetaan dan peninjauan alokasi mata kuliah, khususnya pada CPL08.	Ka. Prodi	2026/2027
10.	**Standar Kompetensi Lulusan**	Peningkatan ketercapaian CPL tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.	pemantauan ketercapaian CPL dan pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan capaian.	Ka. Prodi	2026/2027
		Perluasan jejaring dan peluang rekognisi lulusan.	Pemantauan rekognisi lulusan dan penguatan jejaring dengan DUDIKA untuk memperluas peluang rekognisi.	Ka. Prodi	2026/2027
		Perluasan pemanfaatan karya lulusan oleh DUDIKA dan masyarakat.	pemantauan pemanfaatan karya dan penguatan kerja sama dengan DUDIKA untuk memperluas adopsi karya lulusan.	Ka. Prodi	2026/2027
		Sebanyak 3 lulusan (4,55%) memilih berwirausaha, sehingga tidak termasuk dalam capaian lulusan yang bekerja pada perusahaan/instansi berskala nasional atau multinasional/internasional.	Pemantauan skala tempat kerja lulusan dan penguatan relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja untuk mempertahankan daya saing lulusan.	Ka. Prodi	2026/2027
		Sebagian besar lulusan, yaitu 62 orang (93,94%), masih bekerja di wilayah Kalimantan Barat sehingga persebaran lulusan di luar wilayah lokal masih perlu diperluas.	Pemantauan persebaran tempat kerja lulusan dan penguatan kompetensi serta jejaring kerja untuk memperluas mobilitas lulusan.	Ka. Prodi	2026/2027
11.	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**	perlunya penguatan strategi promosi dan perluasan jangkauan penerimaan mahasiswa baru untuk menjaga pertumbuhan pendaftar secara berkelanjutan.	Melakukan penguatan strategi promosi dan perluasan jangkauan penerimaan mahasiswa baru untuk menjaga pertumbuhan pendaftar.	Ka. Prodi dan TIM PMB	2026/2027
		Terdapat 22 lulusan (9,32%) yang bekerja pada bidang Non-Infokom, sehingga perlu penguatan relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.	Melakukan pemantauan kesesuaian bidang kerja dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.	Ka. Prodi	2026/2027
		Kemampuan berbahasa asing (Inggris) sebesar 61,51% masih di bawah target sehingga menjadi aspek prioritas dalam tindak lanjut peningkatan kompetensi lulusan.	Melakukan pemantauan kepuasan pengguna dan peningkatan kompetensi lulusan, khususnya kemampuan bahasa Inggris.	Ka. Prodi	2026/2027
		Persentase mahasiswa berprestasi masih relatif terbatas, sehingga perlu peningkatan pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam kompetisi.	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kompetisi untuk memperluas jumlah mahasiswa berprestasi.	Ka. Prodi	2026/2027

		Sebanyak 102 mahasiswa (60%) belum terlibat dalam kegiatan pengembangan prestasi.	Pemantauan partisipasi serta penguatan program pembinaan dan pendampingan mahasiswa.	Ka. Prodi	2026/2027
12.	**Standar Proses Pembelajaran**	Belum semua bentuk pembelajaran fleksibel dimanfaatkan secara optimal, khususnya RPL dan pembelajaran pada PS/PT lain, sehingga perlu penguatan implementasinya.	Pemantauan kelengkapan dan keterlacakan dokumen penilaian serta rekognisi secara berkala.	Ka. Prodi	2026/2027
13.	**Standar Penilaian Pembelajaran**	CPL09 sebesar 76,51% menjadi perhatian untuk peningkatan melalui tindak lanjut CQI.	pemantauan hasil asesmen berbasis OBE dan tindak lanjut CQI, khususnya pada CPL09.	Ka. Prodi	2026/2027
14.	**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	Keterbatasan ruang pengembangan laboratorium serta proses pengadaan dan pembaruan peralatan penelitian tertentu yang memerlukan waktu.	Program studi mengendalikan kelayakan sarana prasarana penelitian melalui inventarisasi dan verifikasi fungsi laboratorium secara berkala setiap semester. pemeliharaan rutin, peremajaan perangkat lunak Sistem Informasi yang usang, serta peningkatan fasilitas komputasi guna melampaui standar mutu pada periode mendatang.	Wakil Ketua II, Ka. Prodi, PUSKOM	2026/2027
		Perkembangan teknologi dan kebutuhan penelitian yang terus berubah menuntut pembaruan fasilitas serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar tingkat kepuasan DTPR tetap terjaga.	Program studi menindaklanjuti masukan DTPR pada survei kepuasan untuk menjaga kenyamanan kerja serta mempertahankan tingkat kepuasan dosen terhadap sarana dan prasarana penelitian.		2026/2027
15.	**Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.**	Keterbatasan alokasi dana penelitian internal, meningkatnya kebutuhan pembiayaan penelitian, serta persaingan usulan pendanaan dapat membatasi peningkatan besaran dana yang diterima setiap DTPR.	Mempertahankan alokasi anggaran internal secara konsisten serta memperketat kriteria kelayakan proposal.	Wakil Ketua II dan Ka. LPPM	2026/2027
		Tingginya persaingan memperoleh hibah penelitian, keterbatasan jumlah skema pendanaan eksternal yang relevan, serta perubahan persyaratan dan kebijakan dari lembaga pemberi dana	Mempertahankan ketercapaian dana melalui klinik pendampingan penyusunan proposal hibah. Program studi berupaya melampaui target dengan memperluas skema hibah bersaing tingkat nasional maupun internasional serta mengalokasikan insentif bagi DTPR yang berhasil meraihnya.	Wakil Ketua II dan Ka. LPPM	2026/2027
		Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung dari pelaksana kegiatan, proses verifikasi administrasi, serta pembaruan arsip secara berkala dapat memengaruhi ketepatan waktu dokumentasi laporan keuangan.	Pengendalian kelengkapan dokumentasi dan aksesibilitas laporan keuangan dilakukan melalui audit internal pelaporan pembiayaan penelitian setiap akhir siklus anggaran. Karena target telah terpenuhi, program studi mempertahankan akuntabilitas ini dan berupaya efisiensi melalui	Wakil Ketua II dan Ka. LPPM	2026/2027

			pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan penelitian terintegrasi yang transparan.		
		Persaingan ketat antar DTPR dalam memperebutkan alokasi dana serta keterbatasan kuota hibah penelitian yang tersedia setiap tahunnya menjadi kendala utama pelaksanaan program.	Konsistensi alokasi anggaran dan penyelenggaraan klinik proposal secara berkala. Program studi akan berupaya mengendalikan target ketercapaian pada siklus SPMI berikutnya serta mendorong DTPR pemula untuk lebih aktif mengajukan proposal hibah internal.	Wakil Ketua II dan Ka. LPPM	2026/2027
		Tingkat persaingan yang sangat ketat pada hibah eksternal serta terbatasnya variasi skema pendanaan yang tersedia setiap tahunnya menjadi kendala utama pencapaian target.	Mempertahankan pendampingan intensif oleh reviewer internal. Program studi menaikkan target SPMI dan memperluas jangkauan informasi skema hibah dari kementerian, lembaga swasta, maupun internasional yang relevan.	Wakil Ketua II dan Ka. LPPM	2026/2027
16.	**Standar Proses Penelitian**	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika kebijakan penelitian menuntut penyesuaian roadmap secara berkala agar tetap relevan.	Memonitor implementasi dokumen kerja sama riset yang aktif. Untuk melampaui standar, program studi menargetkan peningkatan jumlah riset kolaboratif dengan memperluas jejaring kemitraan bersama perguruan tinggi maupun lembaga riset.	Ka. LPPM, Ka. Prodi, dan Unit Terkait.	2026/2027
		Keterbatasan waktu koordinasi, penyesuaian dengan perubahan kebijakan penelitian, serta dinamika perkembangan bidang keilmuan dapat memengaruhi ketepatan waktu peninjauan roadmap penelitian	Mempertahankan skema magang riset pada proyek kerja sama. Program studi berupaya memfasilitasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengolahan data dan penyusunan laporan bersama mitra.	Ka. LPPM, Ka. Prodi, dan Unit Terkait.	2026/2027
		Keterbatasan waktu mahasiswa akibat beban akademik, perbedaan minat terhadap topik penelitian, serta penyesuaian jadwal penelitian dapat memengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam setiap judul penelitian.	Memvalidasi daftar anggota tim mahasiswa saat pengajuan proposal dan laporan akhir. Untuk melampaui standar, program studi mendorong penambahan kuota mahasiswa per judul penelitian guna menciptakan kolaborasi lintas angkatan.	Ka. LPPM, Ka. Prodi, dan Unit Terkait.	2026/2027
		Tingkat kesulitan dalam koordinasi lintas institusi serta keterbatasan alokasi waktu pelaksanaan riset kolaboratif menjadi tantangan utama yang kerap menghambat kelancaran program.	Memonitor implementasi dokumen kerja sama riset yang aktif. Untuk melampaui standar, program studi menargetkan peningkatan jumlah riset kolaboratif dengan memperluas jejaring kemitraan bersama perguruan tinggi maupun lembaga riset.	Ka. LPPM, Ka. Prodi, dan Unit Terkait.	2026/2027
		Keterbatasan alokasi waktu yang dimiliki mahasiswa serta tingginya ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan pihak mitra eksternal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan riset kolaboratif.	Mempertahankan skema magang riset pada proyek kerja sama. Program studi berupaya memfasilitasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengolahan data dan penyusunan laporan bersama mitra.	Ka. LPPM, Ka. Prodi, dan Unit Terkait.	2026/2027
17.	**Standar Peneliti**	Beban kerja akademik, keterbatasan waktu DTPR, serta jadwal pelatihan yang berbenturan dengan kegiatan tridarma dapat	Mempertahankan keterlibatan dosen melalui pemetaan kebutuhan pelatihan secara berkala. Program studi berupaya untuk memfasilitasi DTPR untuk mengikuti pelatihan	Ka. LPPM dan Ka. Prodi.	2026/2027

		memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan pengembangan penelitian.	kompetensi maupun metodologi penelitian tingkat internasional.		
		Beban kerja DTPR pada pelaksanaan tridarma, keterbatasan waktu penelitian, serta penyesuaian jadwal dengan kegiatan akademik dapat memengaruhi keberlangsungan penelitian tahunan.	Menjaga iklim akademik yang kondusif dan memonitor beban kerja dosen secara seimbang. Program studi menetapkan target partisipasi penuh serta mendorong DTPR menghasilkan lebih dari satu riset per tahun.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi.	2026/2027
		Beban kerja tridarma, tugas administratif, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian dapat memengaruhi produktivitas DTPR dalam menghasilkan penelitian setiap tahun.	Memonitor ketercapaian luaran penelitian secara berkala melalui evaluasi semesteran. Program studi mendorong pelampauan standar dengan memberikan insentif khusus dan dukungan pendanaan tambahan bagi DTPR yang produktif mempublikasikan hasil risetnya.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi.	2026/2027
18.	**Standar Pengelolaan Penelitian**	Perbedaan minat dan kepakaran DTPR, perkembangan isu penelitian yang cepat, serta peluang kolaborasi pada topik baru dapat memengaruhi tingkat kesesuaian penelitian dengan roadmap Program Studi.	Mempertahankan konsistensi verifikasi topik riset pada tahap seleksi proposal.	Ka. LPPM	2026/2027
19.	**Standar Penilaian Penelitian**	Perbedaan kemampuan dan pengalaman mahasiswa, keterbatasan waktu akibat beban akademik, serta penyesuaian jadwal penelitian dapat memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam keterlibatan penelitian.	Mempertahankan kualitas bimbingan dan pemberian peran yang jelas bagi mahasiswa dalam proyek riset. Program studi berupaya menyediakan fasilitas ruang kerja penelitian yang lebih memadai.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi.	2026/2027
20.	**Standar Isi Penelitian**	Perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis, keterbatasan diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian, serta keterbatasan sumber daya untuk implementasi dapat memengaruhi relevansi luaran penelitian secara berkelanjutan.	Menjaga fokus riset pada penerapan teknologi sistem informasi berdaya guna. Program studi berupaya mengendalikan standar target melalui pembentukan forum diskusi berkala bersama mitra masyarakat guna menjaring topik riset yang aplikatif.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi.	2026/2027
21.	**Standar Hasil Penelitian**	Panjangnya durasi proses review pada jurnal sasaran serta terbatasnya alokasi waktu dosen untuk menyusun artikel berkualitas menjadi tantangan utama yang kerap memperlambat laju publikasi.	Memonitor target luaran tahunan dosen secara berkala. Program studi berupaya melampaui standar dengan menetapkan target partisipasi yang lebih tinggi serta memastikan pencantuman afiliasi program studi pada setiap karya publikasi.	Ka. LPPM	2026/2027
		Panjangnya proses review pada portal jurnal serta ketatnya tingkat persaingan untuk dapat menembus publikasi bereputasi	Mengawal proses pendampingan manuskrip DTPR. Program studi menaikkan target standar SPMI dan menggeser fokus kualitas publikasi ke jurnal nasional terakreditasi peringkat atas (Sinta 1 dan Sinta 2).	Ka. LPPM	2026/2027

		menjadi tantangan utama yang kerap memperlambat laju pencapaian target.			
		Tingginya standar kualitas pada jurnal internasional serta durasi proses review yang sangat panjang dan kompetitif menjadi tantangan utama yang kerap memperlambat pencapaian target publikasi.	Melakukan pemeliharaan insentif artikel bereputasi dan fasilitas proofreading. Program studi berupaya mendorong publikasi DTPR pada jurnal internasional bereputasi tinggi bertaraf Q1/Q2.	Ka. LPPM	2026/2027
		Rumitnya alur proses administrasi pengurusan HKI serta panjangnya durasi waktu pendaftaran yang dibutuhkan hingga sertifikat terbit menjadi kendala utama yang kerap melambatkan penyelesaian target.	Memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta dan Paten produk Sistem Informasi melalui sentra HKI. Program studi mendorong pendaftaran HKI berbasis produk perangkat lunak bernilai komersial.	Ka. LPPM	2026/2027
		Masih minimnya kegiatan sosialisasi hasil riset kepada khalayak luas serta adanya keterbatasan kemampuan adopsi teknologi oleh masyarakat pengguna menjadi tantangan utama dalam proses hilirisasi.	Memonitor keterpakaian produk teknologi oleh pengguna eksternal. Program studi berupaya memfasilitasi kegiatan pameran karya riset dan inkubasi bisnis produk Sistem Informasi.	Ka. LPPM	2026/2027
		Adanya dinamika perbedaan pembaruan kurikulum antar angkatan serta terbatasnya alokasi waktu untuk menyesuaikan materi perkuliahan menjadi kendala utama yang kerap melambatkan proses perataan kualitas.	Melakukan evaluasi RPS dan modul ajar pada setiap awal semester. Program studi mewajibkan pembaharuan studi kasus perkuliahan berdasarkan hasil riset terbaru DTPR.	Ka. LPPM	2026/2027
22.	**Standar Sarana dan Prasarana PkM**	Ketatnya keterbatasan anggaran yang dialokasikan serta panjangnya durasi waktu pengadaan barang menyebabkan proses pemenuhan beberapa jenis fasilitas belum dapat direalisasikan secara maksimal dan menyeluruh.	Capaian pemenuhan sarana dan prasarana PkM sesuai layanan kepakaran Sistem Informasi telah melampaui target. Langkah pengendalian dilakukan dengan mempertahankan ketersediaan fasilitas melalui perawatan teratur. Program studi berupaya meningkatkan standar SPMI dengan menambah sarana komputasi terapan untuk mendukung pengabdian masyarakat berbasis teknologi digital.	Ka. LPPM	2026/2027
		Proses pembaruan materi yang memerlukan waktu cukup panjang guna menyesuaikan dinamika perubahan kebijakan akademik serta tingginya kebutuhan PkM di lapangan menjadi kendala utama penyelarasan dokumen.	Pengendalian ketersediaan modul dan materi PkM dilakukan melalui evaluasi keterbakuan serta keteraksesan materi pada repositori terpadu. Mengingat target terpenuhi, program studi mempertahankan ketersediaan modul ini dan berupaya menaikkan standar dengan memperbarui materi PkM secara berkala mengikuti perkembangan tren teknologi informasi.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
		Adanya sebagian fasilitas yang sudah memerlukan proses pembaruan guna mengakomodasi kompleksitas kebutuhan PkM yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu menjadi tantangan teknis di lapangan.	Menjaga mutu pelayanan fasilitas PkM. Program studi juga menindaklanjuti masukan survei guna mengendalikan layanan sarana dan prasarana PkM yang dilaksanakan DTPR.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027

23.	**Standar Pelaksana PkM**	Tingginya beban kerja akademis yang ditanggung dosen serta ketatnya keterbatasan waktu yang tersedia kerap memengaruhi kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan sebagian agenda kegiatan PkM di lapangan.	Mempertahankan keterlibatan aktif dosen melalui pemantauan beban kerja dosen (BKD). Program studi berupaya melampaui standar dengan menetapkan target partisipasi penuh serta mendorong DTPR melaksanakan lebih dari satu kegiatan PkM per tahun.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
		Tingginya bentrok antara jadwal pelaksanaan pelatihan dengan tingginya beban kerja akademis dosen terkadang menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi peserta secara optimal dalam kegiatan tersebut.	Memfasilitasi kebutuhan peningkatan kepakaran dosen. Program studi menaikkan target indikator SPMI dan mengarahkan DTPR untuk mengikuti workshop pengabdian masyarakat tingkat nasional maupun internasional	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
		Tingginya variasi kebutuhan spesifik masyarakat mitra yang beragam terkadang masih belum sepenuhnya selaras dengan cakupan kepakaran DTPR yang ada, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi program.	Melakukan verifikasi proposal pengabdian secara ketat pada tahap perencanaan. Program studi meningkatkan target standar dan mengarahkan PkM pada penerapan solusi digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
		Keterbatasan alokasi jadwal DTPR serta tingginya frekuensi permintaan narasumber yang datang secara bersamaan dari berbagai pihak mitra eksternal menjadi kendala utama dalam pemenuhan seluruh permintaan.	Menjalin kemitraan serta mempromosikan profil kepakaran dosen ke pihak luar. Program studi berupaya meningkatkan target jumlah DTPR yang berkiprah sebagai pakar di tingkat regional dan nasional.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
24.	**Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM**	Adanya keterbatasan total anggaran operasional lembaga memengaruhi kemampuan dalam melakukan peningkatan nominal pembiayaan kegiatan secara signifikan untuk periode tahun berikutnya, sehingga perlu dilakukan efisiensi skala prioritas.	konsistensi alokasi anggaran dan pengawasan mutu laporan PkM. Program studi berupaya meningkatkan alokasi pendanaan internal per DTPR pada revisi standar SPMI guna mendukung skema PkM yang berkeberlanjutan.	Ka. LPPM dan Wakil Ketua II	2026/2027
		Tingginya tingkat persaingan dalam perebutan hibah kompetitif serta kerap terjadinya perubahan persyaratan teknis secara mendadak dari lembaga penyandang dana menjadi tantangan utama yang memengaruhi tingkat kelulusan proposal.	Memelihara klinik pendampingan penyusunan proposal hibah eksternal. Program studi menaikkan target perolehan dana serta memperluas akses informasi hibah pengabdian dari kementerian dan industri.	Ka. LPPM dan Wakil Ketua II	2026/2027
		Proses pembaruan dokumen kelengkapan yang memerlukan tingginya alur koordinasi antarunit serta ketatnya tuntutan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan	Pengendalian kelengkapan dan aksesibilitas laporan keuangan PkM dilakukan melalui audit internal rutin setiap akhir siklus anggaran. Karena target telah terpenuhi, program studi mempertahankan transparansi ini serta	Ka. LPPM dan Wakil Ketua II	2026/2027

		menjadi tantangan administratif yang cukup menyita waktu operasional.	mengembangkannya ke dalam sistem pelaporan keuangan PkM berbasis digital yang terintegrasi.		
		Tingginya tingkat persaingan antar usulan proposal serta keterbatasan kuota alokasi hibah yang tersedia menjadi kendala utama yang membatasi jumlah penerima pendanaan pada setiap periodenya.	Mempertahankan alokasi dana dan kemudahan proses administrasi. Program studi berupaya melampaui standar dengan menetapkan kriteria luaran PkM internal yang lebih berkualitas pada periode berikutnya.	Ka. LPPM dan Wakil Ketua II	2026/2027
		Ketatnya tingkat persaingan dalam perebutan alokasi hibah kompetitif serta makin tingginya kriteria persyaratan teknis dari pihak penyandang dana eksternal menjadi tantangan utama yang harus dihadapi.	Melaksanakan klinik pendampingan proposal bersama pakar secara berkelanjutan untuk memastikan proposal memenuhi persyaratan dan memiliki kualitas yang baik. Program Studi memperkuat mekanisme pendampingan serta memberikan apresiasi kepada dosen yang berhasil memperoleh hibah PkM eksternal sebagai upaya mendorong keberlanjutan dan peningkatan partisipasi dosen dalam pendanaan PkM eksternal.	Ka. LPPM dan Wakil Ketua II	2026/2027
25.	**Standar Proses PkM**	Proses penyesuaian roadmap yang memerlukan tingkat sinkronisasi secara berkala dengan pesatnya perkembangan kebutuhan masyarakat serta perubahan dinamika kebijakan eksternal menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga relevansi program.	Sosialisasi peta jalan PkM secara berkesinambungan kepada seluruh DTPR untuk memastikan pemahaman dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan arah yang telah ditetapkan. Ke depan, Program Studi berupaya memperkuat peta jalan PkM melalui penajaman arah pengabdian yang berorientasi pada pemecahan permasalahan teknologi di masyarakat serta sesuai dengan bidang kepakaran Program Studi.	Ka. LPPM	2026/2027
		Keterbatasan alokasi waktu untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh serta rumitnya proses penyesuaian terhadap perubahan kebijakan eksternal menjadi tantangan utama yang kerap memperlambat proses penyelarasan roadmap.	Memastikan hasil peninjauan diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PkM. Ke depan, Program Studi berupaya memperkuat proses peninjauan dan pemutakhiran peta jalan agar lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan mitra dan DUDIKA serta tetap relevan dengan arah pengembangan PkM Program Studi.	Ka. LPPM	2026/2027
		Keterbatasan alokasi waktu yang dimiliki mahasiswa di tengah padatnya jadwal perkuliahan menjadi kendala utama yang kerap membatasi partisipasi mereka pada beberapa pelaksanaan agenda kegiatan PkM tertentu.	Memverifikasi partisipasi mahasiswa mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Program studi mempertahankan capaian ini serta meningkatkan kualitas peran mahasiswa agar selaras dengan CPL pembelajaran.	Ka. LPPM	2026/2027
		Tingginya tingkat kesulitan dalam penyesuaian agenda kegiatan bersama mitra eksternal serta adanya perbedaan prioritas program menjadi kendala utama yang menyulitkan penyelarasan jadwal di lapangan.	Memonitor efektivitas implementasi dokumen kerja sama untuk memastikan kolaborasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Program Studi selanjutnya memperkuat keberlanjutan kemitraan melalui pengembangan kerja sama dengan	Ka. LPPM	2026/2027

			DUDIKA serta pemerintah daerah yang relevan dengan bidang kepakaran dan kebutuhan pelaksanaan PkM.		
		Ketatnya keterbatasan waktu di tengah beban kerja yang padat serta tingginya standar seleksi pada forum ilmiah internasional menjadi tantangan utama yang membatasi jumlah luaran karya yang berhasil dipublikasikan.	Menyediakan bantuan dana pendaftaran seminar bagi DTPR untuk mendukung penyebarluasan hasil kegiatan PkM. Program Studi selanjutnya memperkuat kualitas dan jangkauan diseminasi dengan memprioritaskan pemakalah pada konferensi nasional maupun internasional yang relevan dan bereputasi.	Ka. LPPM	2026/2027
26.	**Standar Pengelolaan PkM**	Sebagian DTPR masih mengalami kendala keterbatasan waktu di tengah padatnya aktivitas serta gangguan akses koneksi internet yang kurang stabil, sehingga menjadi hambatan teknis dalam mengoptimalkan partisipasi secara konsisten.	Memberikan kemudahan akses portal roadmap. Program studi menaikkan target indikator SPMI serta mewajibkan keselarasan tema PkM terhadap VMTS pada setiap pengajuan proposal pengabdian.	Ka. LPPM	2026/2027
		Tingginya variasi kebutuhan spesifik dari pihak mitra di lapangan yang terkadang berbeda dari fokus roadmap PkM menjadi tantangan utama yang kerap menyulitkan proses penyelarasan prioritas program kerja.	Melakukan seleksi dan penelaahan usulan PkM agar tema dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan arah roadmap serta layanan kepakaran. Program Studi juga mengarahkan kelompok keahlian dosen pada payung PkM terpadu untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan arah pengembangan roadmap	Ka. LPPM	2026/2027
27.	**Standar Penilaian PkM**	Keterbatasan waktu operasional dosen di tengah padatnya agenda akademik lainnya menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi proses pendampingan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan mahasiswa.	Mempertahankan bimbingan yang terstruktur selama kegiatan di lapangan. Program studi berupaya memberikan rekognisi yang relevan bagi mahasiswa.	Ka. LPPM dan Dosen	2026/2027
28.	**Standar isi PkM**	Tingginya dinamika perubahan kebutuhan spesifik mitra di lapangan serta ketatnya keterbatasan waktu untuk melakukan analisis secara mendalam menjadi kendala utama dalam mempertahankan relevansi perencanaan awal.	Mewajibkan dokumen analisis situasi pada setiap laporan kegiatan sebagai dasar penentuan solusi dan bentuk kegiatan. Program Studi mendorong pengembangan PkM yang berorientasi pada kebutuhan nyata mitra, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung digitalisasi desa dan penguatan UMKM.	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027
29.	**Standar Hasil PkM**	Proses adaptasi teknologi di lapangan yang membutuhkan alokasi waktu cukup panjang serta perlunya penyesuaian terhadap kondisi riil masyarakat mitra menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat keberlanjutan program	Melakukan pendampingan pascakegiatan untuk memastikan solusi atau sistem yang diterapkan dapat terus digunakan dan memberikan manfaat bagi mitra. Program Studi selanjutnya mendorong keberlanjutan pemanfaatan hasil PkM melalui pendampingan lanjutan, pemantauan	Ka. LPPM dan Ka. Prodi	2026/2027

			penggunaan solusi, serta pengembangan hasil PkM yang memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas.		
		Panjangnya alur administrasi pendaftaran serta kompleksnya persyaratan teknis dokumen HKI menjadi tantangan yang kerap memperlambat proses penerbitan sertifikat HKI.	Melakukan pendampingan proses pendaftaran Hak Cipta produk Sistem Informasi ke sentra HKI untuk memastikan proses pengajuan dapat terlaksana dengan baik. Program Studi selanjutnya mendorong pengembangan dan pendaftaran HKI dari hasil kegiatan PkM, khususnya yang berbasis modul pembelajaran, aplikasi, dan produk teknologi tepat guna yang memiliki manfaat bagi mitra dan masyarakat.	Ka. LPPM dan Wakil Ketua III	2026/2027
		Adanya perbedaan spesifikasi kebutuhan dari pihak mitra serta keterbatasan fasilitas pengujian produk di lapangan menjadi kendala utama dalam memvalidasi keandalan hasil inovasi secara optimal.	Memvalidasi keberfungsian teknologi di lingkungan mitra untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Program Studi selanjutnya mendorong pengembangan teknologi tepat guna yang lebih aplikatif dan berkelanjutan serta diarahkan agar dapat diproduksi, diterapkan, dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh mitra dan masyarakat.	Ka. LPPM dan Ka.Prodi	2026/2027
30.	**Standar VMTS**	Perubahan kebutuhan industri yang memerlukan penyesuaian periodik VMTS.	Memperkuat kerja sama dengan mitra (seperti Rumah UMKM), serta mengevaluasi dan meninjau kurikulum secara berkala per tahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi, kebutuhan DUDIKA, dan tuntutan transformasi bisnis daerah, sehingga visi keilmuan Program Studi Sistem Informasi tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Business Analytics dan E-Business Technology.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027
		Sebagian stakeholder eksternal belum mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi.	Memastikan keterlaksanaan dan efektivitas sosialisasi melalui monitoring berkala terhadap penggunaan media, keterjangkauan sasaran, tingkat partisipasi dan pemahaman stakeholder, khususnya stakeholder eksternal yang belum mengikuti kegiatan, dengan menyediakan media alternatif dan komunikasi langsung serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif kepada seluruh stakeholder.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027
		Penyesuaian jadwal beberapa program dengan mitra eksternal.	melakukan evaluasi bersama pihak terkait (seperti LPPM, Prodi, eksternal) disertai penetapan jadwal alternatif dan mekanisme pelaksanaan yang fleksibel. Perubahan jadwal didokumentasikan dan dimonitor oleh penanggung jawab kegiatan agar keterlaksanaan program tetap terjamin. Apabila terjadi kendala lanjutan, dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan mitra, sehingga program tetap dapat dilaksanakan sesuai sasaran,	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027

			mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, serta tetap selaras dengan ciri khas keilmuan.		
		Dosen Berhalangan karena ada hal yang tidak terduga saat hari pelaksanaan.	menyusun alternatif waktu dan mekanisme keterlibatan secara daring atau melalui pemberian masukan tertulis, sehingga keterwakilan DTPR pada tahapan tetap dapat dipenuhi. Seluruh proses partisipasi, masukan, dan hasil keterlibatan DTPR didokumentasikan sebagai bukti dan dijadikan dasar evaluasi pada periode berikutnya.	Wakil Ketua I dan Ka. Prodi	2026/2027
		Keterbatasan waktu stakeholder eksternal untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyusunan atau peninjauan Renstra, dan belum optimalnya partisipasi beberapa stakeholder dalam memberikan masukan secara tertulis dan berkelanjutan.	menyediakan mekanisme partisipasi yang fleksibel melalui rapat daring, survei, konsultasi tertulis, dan forum diskusi terjadwal, sehingga masukan stakeholder tetap dapat dihimpun tanpa bergantung pada kehadiran secara langsung. Seluruh masukan dan hasil keterlibatan stakeholder didokumentasikan, dianalisis, serta ditindaklanjuti dalam penyempurnaan Renstra, sehingga keterlibatan stakeholder menjadi lebih representatif, terukur, dan berkelanjutan pada tiap periode penyusunan maupun peninjauan Renstra.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027
		Keterbatasan waktu pelaksanaan beberapa program.	penjadwalan kegiatan secara lebih realistis, penetapan skala prioritas, serta pembagian tahapan pelaksanaan dan penanggung jawab yang jelas, sehingga seluruh program dapat dilaksanakan sesuai target tanpa mengurangi keselarasan dengan ciri khas keilmuan PS-SI. Seluruh capaian dan kendala pelaksanaan didokumentasikan dan dijadikan bahan evaluasi serta penyempurnaan Renop pada periode berikutnya, sehingga jumlah program kerja yang selaras dapat tercapai secara berkelanjutan.	Wakil Ketua I	2026/2027
		Pengumpulan dokumen pendukung membutuhkan waktu relatif lama.	menstandarisasi daftar dokumen bukti, penetapan penanggung jawab dan batas waktu pengumpulan, serta pemanfaatan penyimpanan dokumen secara terpusat dan digital agar dokumen dapat tersedia secara lengkap dan tepat waktu. Seluruh hasil evaluasi, bukti dukung, temuan, dan tindak lanjut didokumentasikan secara sistematis dan dimonitor secara berkala sebagai dasar pengendalian dan penyempurnaan Renstra dan Renop pada periode berikutnya.	Wakil Ketua I	2026/2027
		Sebagian rekomendasi membutuhkan dukungan sumber daya tambahan.	monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkala, pemberian dukungan kebijakan, serta pengintegrasian hasil evaluasi Renstra dan Renop ke dalam perencanaan dan program kerja PS-SI agar keberlanjutan tindak lanjut tetap terjamin.	Wakil Ketua I	2026/2027
		Persaingan memperoleh rekognisi eksternal semakin tinggi.	membuat pemetaan dan pemantauan secara berkala terhadap berbagai peluang penghargaan/pengakuan yang	Wakil Ketua I	2026/2027

			relevan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan PkM, disertai peningkatan kualitas proposal, publikasi, inovasi, dan dokumentasi capaian unggulan PS-SI. Tiap capaian dan peluang rekognisi didokumentasikan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara terencana, berkaitan dengan pendidikan, penelitian, atau PkM, sehingga capaian rekognisi eksternal dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.		
		Perbedaan jadwal dan prioritas antarmitra.	berkoordinasi dan mengonfirmasi jadwal minimal 1 bulan sebelum kegiatan, menyusun kalender kegiatan bersama mitra, serta menyediakan alternatif waktu atau bentuk kegiatan. Tiap kerja sama yang belum terealisasi ditindaklanjuti paling lambat 1 bulan setelah hasil monitoring melalui komunikasi dan penyesuaian rencana kegiatan, dengan bukti tindak lanjut berupa IA/LPKS, jadwal kegiatan, surat tugas, dokumentasi kegiatan, dan laporan pelaksanaan.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027
		Kecepatan tindak lanjut terhadap beberapa kebutuhan mitra masih perlu ditingkatkan.	masukan atau keluhan yang masuk dicatat dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari kerja, dengan menetapkan PIC dan batas waktu penyelesaian yang terdokumentasi. Hasil tindak lanjut dievaluasi tiap semester dan menjadi dasar perbaikan layanan serta pelaksanaan Tridharma.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027
		Dinamika kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektor industri.	memonitor kebutuhan tenaga kerja minimal 1 kali setiap semester dan memperbarui database peluang rekrutmen dari seluruh mitra, serta menindaklanjuti informasi kebutuhan tenaga kerja dengan menyampaikannya kepada mahasiswa/alumni yang memenuhi kualifikasi. Evaluasi keterlibatan mitra dilakukan minimal 1 kali per tahun. Mitra DUDIKA aktif terlibat dalam kegiatan rekrutmen atau penyediaan akses rekrutmen lulusan, yang dibuktikan melalui IA/PKS, informasi lowongan, undangan rekrutmen, daftar peserta, dan laporan penempatan lulusan.	Wakil Ketua I dan Unit Kerja Sama	2026/2027

Catatan:
Daftar Peserta Rapat

No.	Nama Peserta	Keterangan
1.	Dr. Sandy Kosasi, M.M., M.Kom	V
2.	Dr. Susanti MK, S.Kom., M.Kom	V
3.	Dr. Gusti Syarifudin, S.T., MMSI., M.Kom	V
4.	Dr. David, S.Kom., M.Cs., M.Kom	V
5.	Dr. Gat, S.Kom., M.Kom	V
6.	Ponti Hariyanto, S.Kom., M.Kom	V
7.	Hendra Kurniawan, S,Kom., M.Kom	V
8.	Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom., M.Kom	V
9.	Rendy Amy Saputra, S.T., M.E	V
10.	Velika Wibowo, B.Asc., M.Arch	V

Keterangan:
V : Hadir
I : Izin
X : Tidak Hadir Tanpa Keterangan

Dokumentasi Kegiatan





SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
PONTIANAK

Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

PRESENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
STMIK PONTIANAK
SELASA, 18 AGUSTUS 2026

NO	NIDN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	1105116601	Dr. Sandy Kosasi, M.M., M.Kom	
2.	1101027203	Dr. Susanti M.K, S.Kom, M.Kom	
3.	1129077201	Dr. Gusti Syarifudin, S.T, MMSI, M.Kom	
4.	1129068001	Dr. David, S.Kom, M.Cs, M.Kom	
5.	118027601	Dr. Gat, S.Kom, M.Kom	
6.	1118027601	Ponti Harianto, S.Kom., M.Cs	
7.	1112029002	Wahyu Sindu Prasetya, S.Kom, M.Kom	
8.	1127118402	Hendra Kurniawan, S.Kom, M.Kom	
9.	1119059105	Rendy Ami Saputra, S.T, M.E	
10.	-	Velika Wibowo, B.ASc., M.Arch	